



Judul : BPD diminta maksimal biayai kredit produktif
Tanggal : Minggu, 07 Juni 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Genjot Ekonomi Daerah BPD Diminta Maksimal Biayai Kredit Produktif

ANGGOTA Komisi II DPR Rycko Mendoza mendukung penggunaan peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam membangun RLU. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Keberadaan BPD harus bisa berdampak nyata bagi pembangunan serta pertumbuhan ekonomi. Selain itu, BPD harus bisa meningkatkan dan mengelola secara optimal jumlah total aset semata.

Rycko mengatakan, Bank daerah harus benar-benar hadir untuk kepentingan masyarakat luas dan pembangunan di daerah. Saat ini, salah satu tantangan besar adalah belum optimalnya komitmen Pemda selaku pennebagian. Selama pengendalian dalam menetapkan dana, Komd bisa itu membuat peran strategis BPD masih belum optimal.

Dia mencontohkan, ada situasi di mana sejumlah pelaku jasa keuangan yang dibarengi menggunakan kredit ke bank lain. BPD hanya jadi tempat fasilitas pembayaran proyek, sementara kredit modal justru dari bank lain. Itu tentu sangat besar bagi BPD itu," katanya, Jumat (6/6/2016).

Rycko menilai, BPD belum maksimal menyalurkan kredit usaha rakyat untuk pembayaaan produktif bagi pelaku usaha kecil. Selain itu, BPD masih bergantung pada aktivitas membayar gaji ASN. Sementara, kemampuan kredit untuk produktif masih membutuhkan akselerasi yang jauh lebih baik.

BPD, kata Rycko, bukan hanya jadi ujung tombak pembayaaan usaha untuk membangun di daerah. Karena mereka lebih memahami karakteristik ekonomi lokal pada umumnya. Maka, itu penting bagi BPD untuk agar di masa depan bisa mendukung ekonomi kerakyatan tumbuh lebih baik.

Anggota Komisi II Milhamad Khozin menambahkan, Pemerintah harus menjadikan BPD sebagai model dalam menyalurkan regulasi baru BUMD. Selain itu, BPD harus menjaga profesionalisme dan kesehatan perusahaan harus jadi rujukan dalam reformasi BUMD secara menyeluruh agar bisa berkembang dengan lebih sehat lagi.

Perhatian Komisi II terhadap BPD, kata Khozin, bukan tanpa alasan. Di tengah banyaknya BUMD yang kesulitan berkembang bahkan merubuhkan kea- ngan daerah, BPD justru tampil relatif sehat. Mereka terbukti mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah di seluruh Indonesia.

Salah satu faktor yang membuat BPD mampu bertahan dan berkembang adalah kea- ngan sistem pengawasaan yang mengikat sektor perbankan. Berbeda dengan BUMD lain yang banyak tunduk pada regulasi daerah, BPD juga harus mematuhi aturan OJK, LPS, serta berbagai regulasi industri perbankan nasional," jelasnya.

Menurutnya, lapisan penga- wasaan itu mempermudah ruang inovasi publik yang selama ini kerap menjadi sumber per- sebaran di sejumlah BUMD. Pro- ses pengelolaan perusahaan dapat berjalan lebih profesional dan berbasis kompetensi. Itu sangat mendukung terciptanya ekosis- tem usaha yang jauh lebih sehat.

Pengawasan BPD menbuktik- an bahwa bisa dikelola yang kuat jadi kunci utama menciptakan perusahaan daerah yang sehat, produktif dan bermaslah. Ka- rena itu, Komisi II meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak sekadar menyusun regulasi baru. Harus mengedepi praktik terbaik yang bisa berhasil diterapkan per- bankan daerah," tegasnya.

Selanjutnya, dia meminta Ketua Komisi II DPR Rifqizama

“Makanya perannya harus dioptimalkan agar di masa depan bisa mendorong ekonomi kerakyatan tumbuh lebih kuat dan berdaya saing.”

RYCKO MENDOZA
Anggota Komisi II DPR RI

Karsayuda mendorong agar BPD mendapat proteksi khusus dalam Eselonisasi Peraturan Perincian tentang BUMD mau- pun RLU BUMD yang tengah disiapkan. Pertindungan itu khusus mengingat BPD mengha- dang tantangan regulasi perban- kan yang semakin ketat, namun tetap harus berperan strategis dalam pembangunan daerah.

Rifqizama bilang, tantangan yang dihadapi BPD semakin besar seiring meningkatnya pesya- ran yang harus dipenuhi bank umum. Termasuk terkait kecukupan modal minimum yang naik jadi Rp 6 triliun. “Berka- dar kemampuan APBD sangat- sangat dipesankan hanya sebagai- yang mampu memenuhi rasio kecukupan modal minimumnya secara reguler,” dia bilang.

BPD, kata Rifqizama, bukan sekla- ra merelakan fungsi perban- kan secara umum. Tetapi ada dua fungsi khusus di dalamnya. Pertama sebagai perantara dan akselerator pembangunan di daerah. Kedua sebagai penan- gung kas daerah. Peran ganda ini sangat vital bagi stabilitas keuangan daerah.

Keberlangsungan BPD perlu mendapat perhatian khusus dalam regulasi BUMD yang sedang disusun. Terlebih, bank daerah selama ini dinilai masih BUMD yang mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah. “Kontribusi itu melalui pembagian dividen yang rutin disetorkan kepada Kas Pemda tiap tahun,” katanya.

Menanggapi usulan-usulan itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menjelaskan, sektor perbankan merupakan salah satu pilar usaha BUMD yang paling mengun- tungkan. Capaian itu didukung tata kelola perusahaan yang baik serta SDM profesional. Selain itu, proses seleksi direksi dan komisaris pada BUMD sektor perbankan mengikuti ketentuan dari OJK.

Di bidang-bidang lain, sebut dia, OJK terlihat ada aturan yang membuat mekanisme rekrut- menyanya jadi lebih relatif. Pada akhirnya lebih banyak didominasi oleh peran kepala daerah sebagai penanggung jawab. “Kondisi itu sering kali menimbulkan ketidala- dalam manajemen professional di fase sektor perbankan BUMD,” ujarnya.

Terkait kondisi ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan pengawasaan ter- hadap BUMD. Antara lain lewat usulan perundangan PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD. Melalui perubahan itu, diharap- kan dapat dilakukan optimalisasi fungsi pembinaan serta penga- wasaan oleh unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian.

Halanya juga sudah mengu- sulkan untuk penguatan penga- wasaan pembinaan itu agar BUMD dirangai oleh seorang Dirjen, eselon I. Saat ini, pem- binaannya masih berada di bawah Dirjen Bina Keuangan Dae- rah. Perubahan ini akan segera dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan seluruh BUMD yang tersebar di berbagai daerah,” tandasnya. ■ PVE